



Judul : Pemerintah Konsolidasi Fiskal
Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 10

Pemerintah Konsolidasi Fiskal

Pemerintah mempersiapkan kemungkinan pandemi Covid-19 menjadi endemi.

■ NOVITA INTAN

JAKARTA — Pemerintah akan memulai proses konsolidasi dan reformasi fiskal pada tahun depan. Dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022 dan Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pengelolaan pembiayaan akan dilakukan secara hati-hati. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang *prudent* dan hati-hati untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan," ujar Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (16/8).

Pemerintah mengajukan Rancangan APBN (RAPBN) 2022 de-

ngan mengusung asumsi makro berupa pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5 sampai 5,5 persen. Kemudian, inflasi berada pada level 3 persen, kurs rupiah 14.350 per dolar AS, dan suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 6,82 persen.

Dengan indikator tersebut, pemerintah pun merancang belanja negara pada tahun depan sebesar Rp 2.708,7 triliun dan pendapatan negara Rp 1.840,7 triliun. Dari postur itu, APBN mengalami defisit senilai Rp 868 triliun atau 4,85 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, angka defisit mengalami pelebaran dari Rp 384,7 triliun pada 2019 menjadi Rp 947,7 triliun pada 2020 atau setara 6,14 persen dari PDB. Hal ini terutama dilakukan untuk meredam dampak pandemi terhadap perekonomian. Sementara, dalam APBN 2021, defisit anggaran diperkirakan menurun ke level Rp 961,5 triliun atau 5,82 persen terhadap PDB.

Menurutnya, konsolidasi fiskal pada 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akelerasi pem-

bangunan SDM. Adapun langkah itu dicapai melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan.

Jokowi juga menargetkan pada 2023 defisit anggaran dapat kembali ke level paling tinggi tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jokowi memastikan, defisit anggaran pada 2022 dikelola secara hati-hati dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Pemerintah juga mempersiapkan kemungkinan pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perilihan tersebut harus disertai dengan perluasan vaksinasi serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Kita mungkin melihat pada 2022 akan mengalami suatu masa, pandemi menjadi endemi sesuai dengan pandangan dari berbagai para ilmuwan mengenai apa kemungkinan masa depan dari pandemi ini," ujar Sri.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menilai, pemulihhan ekonomi akan sangat bergantung pada kemampuan suatu negara dalam mengakses vaksin dan menangani pandemi. Oleh karena itu, fokus APBN 2022 adalah pemulihhan ekonomi dan reformasi struktural.

Sri menyiapkan anggaran yang cukup untuk pengendalian kasus Covid-19 dan vaksinasi pada 2022. Selain itu, pemerintah juga akan membuat skema relokasi anggaran secara otomatis apabila terjadi lonjakan kasus dadakan, seperti penyebaran varian delta beberapa waktu lalu. Dengan skema itu, diharapkan tidak muncul gangguan dalam pelaksanaan APBN apabila ada lonjakan kasus.

"Kita berharap itu tidak terjadi, tapi tetap APBN harus menyiapkan kalau sampai hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi pada 2022," ucapnya.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menilai, APBN 2022 cukup realistik dan terlihat hati-hati. Hal itu tecerminkan dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021 dan defisit anggaran 2022 yang juga lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

"Dilihat dari struktur APBN 2022, daya dukungnya terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak sekuat APBN 2021. Oleh karenanya itu, untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah kuncinya adalah pelaksanaan APBN 2022 harus mendapat dukungan kebijakan non-fiskal yang lebih efektif," kata Gobel. ■ ed: ahmad fikri noor